



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

UJI PUBLIK PENULISAN ULANG SEJARAH INDONESIA

Fieka Nurul Arifa
Analisis Legislatif Ahli Muda
fieka.arifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) akan memulai uji publik draf penulisan ulang Sejarah Nasional Indonesia pada 20 Juli 2025. Langkah ini dinilai sebagai momentum penting untuk memperbarui narasi sejarah agar lebih inklusif, faktual, dan mencerminkan perjalanan bangsa secara utuh. Penulisan ulang sejarah nasional terakhir kali dilakukan pada era Presiden BJ Habibie, dan sejak saat itu belum pernah direvisi secara menyeluruh. Akibatnya, berbagai peristiwa penting dalam perjalanan Indonesia belum sepenuhnya tercatat dalam buku sejarah resmi yang digunakan di sekolah maupun di masyarakat luas.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menegaskan bahwa uji publik ini dilakukan untuk memastikan draf sejarah nasional benar-benar sesuai dengan fakta, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Menurut Fadli Zon, selama ini banyak kritik berdatangan dari masyarakat melalui media sosial, tetapi menurutnya kritik yang datang serta apa yang menjadi bahan diskusi di media sosial hanya berdasarkan asumsi. Oleh sebab itu, uji publik ini bisa berfungsi untuk memaparkan rancangan atau draf dari tulisan di dalam buku nanti. Uji publik juga diharapkan menjadi sarana memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap sejarah bangsanya sendiri. Melalui uji publik, masyarakat luas diberikan ruang untuk menyampaikan kritik, saran, maupun masukan yang bersifat korektif terhadap materi yang telah disusun oleh tim penulis.

Proses uji publik akan dilakukan dalam bentuk forum tatap muka di berbagai daerah, serta kanal daring agar partisipasi masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia dapat terakomodasi dengan baik. Format kegiatan meliputi diskusi panel, forum kelompok terfokus, dan pengumpulan masukan tertulis. Kemenbud menekankan bahwa seluruh masukan yang diterima akan dihimpun dan dijadikan bahan penyempurnaan draf sebelum disahkan. Partisipasi publik ini diharapkan dapat memperkaya perspektif serta mencegah bias narasi, sehingga sejarah yang dihasilkan tidak lagi bersifat Jakarta-sentris atau mengabaikan peran kelompok tertentu.

Selain masyarakat umum, Kemenbud juga melibatkan akademisi, guru sejarah, dan sejarawan independen dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Pelibatan para ahli ini bertujuan untuk memperkuat landasan ilmiah serta memastikan draf sejarah nasional bebas dari kepentingan tertentu. Kehadiran para akademisi diharapkan dapat menambah kedalaman analisis, memperkaya konten, sekaligus memperkuat validitas akademik dari setiap peristiwa yang ditulis.

Setelah seluruh masukan dihimpun dan draf disempurnakan, hasil penulisan ulang sejarah nasional akan digunakan sebagai bahan ajar resmi di sekolah mulai tahun ajaran 2026/2027. Dengan demikian, generasi muda Indonesia diharapkan dapat mempelajari sejarah yang lebih lengkap, beragam, dan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan terbaru. Langkah ini juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa kebanggaan, memperkuat identitas nasional, dan meningkatkan semangat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

Penulisan ulang sejarah nasional yang melibatkan publik secara luas ini tidak hanya menjadi proses akademis semata, tetapi juga menjadi usaha kolektif dalam merawat memori bangsa dan membangun masa depan yang lebih inklusif. Melalui partisipasi aktif berbagai pihak, termasuk pengawasan ketat DPR RI, pemerintah berharap dapat menghasilkan narasi sejarah yang lebih adil, objektif, dan menjadi fondasi kuat bagi perjalanan bangsa ke depan.

Atensi DPR

DPR RI melalui Komisi X berperan strategis dalam mengawal jalannya uji publik. Komisi X DPR RI perlu mengawasi seluruh proses dengan ketat agar berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik praktis. Komisi X DPR RI juga perlu memastikan hasil akhir penulisan ulang sejarah nasional benar-benar menjadi dokumen yang jujur dan adil, sekaligus dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai rujukan yang sah. Selain itu, Komisi X DPR RI juga perlu mendorong agar masyarakat tidak ragu menyampaikan kritik dan masukan selama uji publik berlangsung, karena partisipasi publik merupakan bagian penting dalam menjaga keutuhan sejarah sebagai identitas dan memori kolektif bangsa. Untuk memperkuat pengawasan, DPR RI dapat menugaskan tim khusus untuk melakukan supervisi terhadap penulisan ulang sejarah yang dilakukan Kemenbud. Tim supervisi tersebut dapat terdiri dari gabungan Komisi III dan Komisi X DPR RI, sehingga diharapkan dapat memastikan setiap tahap penulisan ulang berjalan objektif dan sesuai dengan prinsip transparansi yang telah disepakati bersama.

Sumber

antaranews.com, 9 Juli 2025;
 cnnindonesia.com, 12 Juli 2025;
 detik.co., 10 Juli 2025;
 kompas.com, 9, 12, dan 13 Juli 2025; dan
 tempo.co, 11 Juli 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Venti Eka Satya
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Ulyy Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
 Ulayya Sarfina
 Yosephus Mainake
 M. Z. Emir Zanggi
 Muhammad Insan F.
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
 Evidence Based Policy Making*